BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah pada saat ini telah dituntut untuk dapat menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Untuk dapat menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, yang disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2014:201), yang dimaksud sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer."

Menurut Moh. Mahsun, dkk (2016:91), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, penyajian atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD".

Menurut M. Ramli Faud (2015:4), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

> "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari organisasi pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak internal dan eksternal."

Dari definisi-defenisi yang telah dipaparkan maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.1.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012:44) terdiri dari:

1) Pencatatan

   Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.

2) Pengidentifikasian

   Pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.

3) Pelaporan

   Pelaporan adalah transaksi ekonomi menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto (2015:4) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Pencatatan
    a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
    b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
    c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2) Pengikhtisaran
    a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar
    b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian
    c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur
    d. Pembuatan ayat jurnal penutup
    e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan
    f. Pembuatan ayat jurnal pembalik
3) Pelaporan

    Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto (2015:4) yaitu: pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Sedarmayanti (2017:11) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan:

> "Kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakn suatu kegiatan, (bersifat teknis dan manajerial). Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama."

Menurut American Accounting Association (AAA) Committee dalam R.A Supriyono (2017:248) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan:

> "Sumber daya manusia adalah proses identifikasi dan pengukuran suatu data mengenai sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi yang dihasilkannya pada pihak yang berkepentingan."

Sedangkan menurut Kasmir (2016:6) definisi kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

> "Sumber daya manusia adalah proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder".

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah proses pengelolaan manusia yang memiliki kemampuan berfikir untuk mengkomunikasikan informasi yang dihasilkannya pada pihak yang berkepentingan guna mencapai tujuan dan kesejahteraan perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan kualitas sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2017:11) adalah sebagai berikut:

1) Memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan organisasi atau perusahaan memiliki tenaga kerja bermotivasi dan berkinerja tinggi, dilengkapi sarana untuk menghadapi perubahan.
2) Memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.
3) Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.
4) Menyediakan sarana komunikasi antar karyawan dengan manajemen organisasi.
5) Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan segi-segi sumber daya manusia.
6) Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan.

2.1.2.3 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Menurut Sedarmayanti (2017:397) mengatakan bahwa indikator kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

   Suatu proses, teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.

2) Pelatihan

   Suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keahlian dan keterampilan seseorang atas sekelompok dalam menangani tugas dan fungsi melalui prosedur sistematis dan terorganisasi yang berlangsung dalam waktu yang relative singkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan indikator kualitas sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2017:397) yaitu pendidikan dan pelatihan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keungan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hery (2016:3) laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

> "Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan daerah merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan atau pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan maupun pemerintahan dan kinerja perusaahan ataupun pemerintah daerah."

Menurut Moh. Mahsun dkk (2016:92) laporan keuangan daerah adalah sebagai berkut:

> "Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal."

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto (2015:19) laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah adalah sebagai berkut:

> "Suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya."

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan proses pencatatan informasi keuangan meliputi tahap pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan pun harus memiliki informasi yang lengkap agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan laporan keuangan menurut M. Ramli Faud (2015:68) adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda.
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda.
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7) Menyediakan informasi berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan oleh Erlina dkk (2015:20) sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya."

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya."

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.3.3 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber dana ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatanya terhadap pelaturan perundang-undangan.

Menurut Baldric Siregar (2017:111) Laporan keuangan disusun untuk berbagai peran. Peran pelaporan keuangan meliputi:

1) Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya.
2) Manajemen, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian.
3) Tranparansi, yaitu pemberian informasi yang terbuka bagi pemakai laporan keuangan.

2.1.3.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Baldric Siregar (2017:112) menyatakan bahwa ukuran-ukuran yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik laporan keuangan:

1) Relevan

   Informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, dan lengkap.

2) Andal

   Informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi, dan netral.

3) Dapat dibandingkan

   Laporan keuangan dapat dibandingkan antar-periode dan antar-unit pemerintahan.

4) Dapat dipahami

   Informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto (2015:8) keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).* Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat diverifikasi *(verifiability).* Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas

   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan karakteristik menurut Erlina, Omar Sakti Rambe dan rasdianto (2015:8) yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami sebagai indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di atur dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang mengacu pada pedoman umum yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam

Negeri. Oleh karena itu saat ini pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah yang memuat tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah "sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan".

Menurut Pramono Hariadi (2013:131) mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai berikut "untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah yang memadai".

Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:76) menyatakan bahwa "dalam PP 71 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemda. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuaangan pemda di Indonesia. Untuk dapat menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang harus dilaksanakan oleh setiap pemda".

Hasil penelitian ini sejalan dengan Lia Hanifa, Andi Basru Wawo, dan Husin (2016) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan setiap penambahan satu tingkat sistem akuntansi keuangan daerah maka akan menambah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh A. Dahri Adipatra, Lanteng Bustami dan Hasriani (2015) menyimpulkan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) menyimpulkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakain tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

2.2.2 Pengaruh Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa mudah dipahami merupakan salah satu indikator berkualitasnya LKPD. Mudah dipahami di sini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian

akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Jumlah pegawai staf akuntansi masih kurang dan sebagian besar pegawai sub-bagian akuntansi atau tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personel, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009 : 4) kualitas sumber daya manusia dapat membantu untuk menghasilkan informasi. Sehingga dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan daerah pun otomatis akan meningkat.

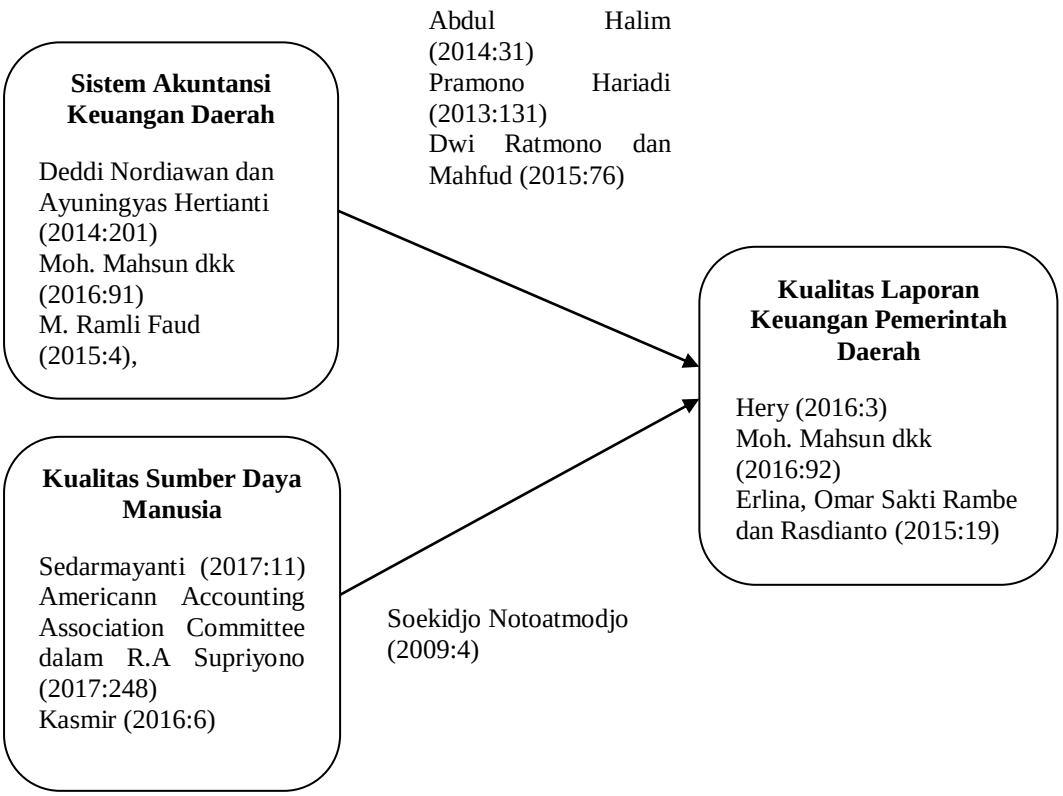
Dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pada manajemen atau pemerintah atas sumber daya sebagai kualitas sumber daya manusia yang dipercayakan kepada kinerja yang telah dicapai dalam laporan akuntansi dalam peramalan masa yang

akan datang. Adanya kualitas sumber daya manusia akan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dalam memberikan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Liza Mutiana, Yossi Diantimala, Zuraida (2017) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan daerah maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Adapun menurut Ismi Deshinta Putri, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017) bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka belum tentu akan mempengaruhi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah begitupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

PARADIGMA PENELITIAN



Gambar 2.1

Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:114) hipotesis penelitian adalah:

> "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan".

Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H_1 : Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2 : Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.